

Setelah Periksa MUI, Kemenag dan Ahli, Bareskrim Polri Panggil Panji Gumilang

JAKARTA (IM) - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri telah memeriksa sejumlah pihak dan ahli terkait dengan polemik Pondok Pesantren Al zaytu.

Dit Tipidum Bareskrim Polri sendiri sudah melayangkan panggilan pemeriksaan terhadap Pimpinan Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang, pada Senin (3/7). "Kami sudah periksa dari pelapor, beberapa ahli," kata Dir Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro kepada awak media, Jakarta, Minggu (2/7).

Djuhandhani juga menyatakan bahwa penyidik Bareskrim sudah meminta keterangan dari pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama (Kemenag) terkait hal tersebut.

"Kemudian dari MUI, Kementerian Agama," ujar Djuhandhani.

Diketahui, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri men-

jadwalkan melakukan pemeriksaan terhadap Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang pada, Senin (3/7) mendatang.

Panji Gumilang dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh Forum Pembela Pancasila (FAPP) pada, Jumat 23 Juni 2023 atas dugaan penistaan agama.

Laporan atas Panji pun teregister dengan nomor: LP/B/163/VI/2023/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 23 Juni 2023. Kemudian, NII Crisis Center juga telah melaporkan Panji Gumilang, terkait kasus dugaan penistaan agama ke Bareskrim Polri.

Bareskrim Polri pun menerima laporan dari NII Crisis Center tersebut dengan registrasi Nomor: LP/B/169/VI/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI 27 Juni 2023

Panji dilaporkan sebagaimana dengan Pasal 156 A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penistaan Agama. ● han

Satgas Antimafia Bola Perlu Diperkuat dengan Intelijen Khusus

JAKARTA (IM) - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang kembali mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Bola, mendapat dukungan dari anggota DPR. Agar kinerja lebih efektif, Satgas Antimafia Bola sebaiknya dilengkapi dengan intelijen khusus.

Pernyataan ini dikatakan Anggota Komisi X DPR Andreas Hugo Pareira.

"Untuk membuat satgas ini lebih efektif, perlu diperkuat dengan intelijen khusus untuk mendeteksi dini kerja mafia bola," kata Andreas kepada wartawan, Minggu (2/7).

PDI-P ini mengibaratkan tugas intelijen tersebut sama halnya dengan intelijen memberantas teroris. Intelijen memiliki peran penting untuk mendeteksi dini gerakan para teroris, demikian juga di dunia sepak bola.

"Kalau mau membangun Satgas antimafia bola yang efektif, maka aspek intelijen harus benar-benar kuat sehingga mampu mendeteksi secara dini semua pergerakan para mafia bola," katanya.

Andreas sepakat dengan Kapolri bahwa Satgas Anti-

mafia bola diperlukan. Sebab menurutnya, mafia bola adalah salah satu penyebab utama rusaknya sepak bola Indonesia.

"Yang targetnya adalah judi pengaturan skor sehingga akibatnya pertandingan-pertandingan sepak bola tidak lebih hanya seperti sandiwara di atas rumput hijau," ujar Andre memberi contoh.

"Mafia bola bisa merambah ke semua elemen utama sebuah pertandingan; bisa melalui wasit, pelatih atau bahkan pemain. Polri tentu seharusnya bisa mengantisipasi mafia bola," ungkapnya.

Kapolri sebelumnya memastikan Satuan Tugas Antimafia Bola telah diaktifkan kembali.

Tujuannya supaya kompetisi sepak bola Tanah Air berjalan fair dan berkualitas. Hal ini disampaikan Listyo saat berpidato di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Bhayangkara di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (1/7).

"Mengaktifkan kembali Satgas Antimafia Bola untuk mengawal kompetisi sepak bola yang fair dan berkualitas," kata Listyo. ● han

Buang Kencing dan Tinja ke Rumah Tetangga Didugat Ratusan Juta

SIDOARJO (IM) - Masriah telah bebas setelah mendekam sebulan dalam penjara.

Ia ditangkap polisi akibat perbuatannya yang sering membuang air kencing hingga tinja ke rumah tetangganya.

Kendati sudah bebas dari penjara, ternyata kasus yang menjerat Masriah belum selesai. Wiwik, tetangga yang menjadi korban Masriah justru melayangkan tuntutan secara perdata dengan ratusan juta.

Nur Mas'ud, menantu Wiwik yang melaporkan pidana kasus penyiraman air kencing dan tinja ke polisi mengatakan, setelah mendengar kabar Masriah bebas setelah sebulan dipenjara di Lapas Kelas II A Sidoarjo, pihaknya akan menuntut Masriah atas teror kencing dan tinja itu secara perdata.

"Keluarga kami sudah sepakat, setelah Masriah bebas kami akan menuntut dia secara perdata," kata Nur Mas'ud saat ditemui detikJatim di rumahnya, Sabtu (1/7).

Nur Mas'ud menjelaskan, pihaknya sudah mendatangi kuasa hukum untuk melihat berkas-berkas yang telah disiapkan. Berkas itu ditandatangani sejak Senin (26/6) yang lalu.

Tuntutan itu untuk menggantikan kerusakan-kerusakan akibat penyiraman air kencing dan tinja.

"Nilainya sekitar ratu-

san juta, itu kami lakukan agar Masriah jera. Supaya di kemudian hari keluarga kami tidak diremehkan lagi oleh Masriah," jelas Nur Mas'ud.

Dimas Pangga Putra W, kuasa hukum keluarga Wiwik, membenarkan pernyataan Nur Mas'ud.

Pihaknya telah mengajukan permohonan gugatan perdata atas kasus penyiraman air kencing dan tinja yang telah dilakukan oleh Masriah selama 6 tahun sejak 2017.

"Rencananya Bu Wiwik akan mengajukan gugatan perdata untuk meminta ganti rugi atas perbuatan Bu Masriah yang sudah dialami selama 6 tahun," kata Dimas.

Gugatan itu sudah diajukan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo secara online karena sejumlah instansi sedang cuti bersama Hari Raya Idul Adha mulai 28 Juni hingga 30 Juni.

"Tuntutannya sesuai dengan kerugian yang timbul akibat terdapat penyiraman air kencing dan tinja. Seperti biaya pengobatan, biaya ganti pagar, dan penggantian biaya beli pembersih lantai," kata Dimas.

Masriah melakukan penyiraman air kencing dan tinja ke rumah Wiwik sejak 2017 hingga 2023.

Dia divonis hakim telah melanggar Perda Nomor 10 tahun 2013. Sesuai pasal 8 ayat (1) huruf C, Masriah dikenai tindak pidana ringan dengan pidana 1 bulan penjara. ● han

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



PEMUSNAHAN BOM IKAN RAKITAN

Sejumlah personel dari Tim Jibom Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Barat membawa bom ikan rakitan yang telah diuraikan saat pemusnahan bom di lapangan Gor Rawang, Kota Pariaman, Sumatera Barat, Minggu (2/7). Tim Jibom Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Barat memusnahkan 10 botol bom ikan rakitan dan ranjau aktif bekas peninggalan penjajahan Jepang yang ditemukan pada 2021.

Pemilih di Pemilu 2024 Mayoritas Generasi Milenial Disusul Gen X

KPU tetapkan DPT Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222. Jumlah itu didapat dari hasil rekapitulasi pemilih di 38 provinsi dan pemilih di 128 negara.

JAKARTA (IM) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memotret

Mayoritas pemilih pada Pemilu 2024 merupakan generasi milenial. Hal itu terpapar KPU dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 yang jumlahnya 204.807.222 orang.

Komisiner KPU Betty Epsilon Idroos mengatakan, jumlah pemilih dari generasi milenial sebanyak 68.822.389 atau 33,60% dari jumlah DPT Pemilu 2024. Sementara Generasi X, berada di urutan kedua, yakni 57.486.482 pemilih atau 28,07% dari total DPT.

"Gen Z 46.800.161 atau 22,85%, Baby Boomer 28.127.340 atau 13,73%;

Preboomer 3.570.850 atau 1,74%" ujar Betty dalam rapat pleno rekapitulasi penetapan DPT Pemilu 2024 di Kantor KPU Pusat, Jakarta Pusat, Minggu (2/7).

Selain itu, KPU juga mengategorikan DPT berdasarkan umur. Hasilnya, pemilih berumur 40 tahun ke bawah menjadi mayoritas pada Pemilu 2024.

Pemilih yang berumur kurang dari 17 tahun tapi sudah punya hak memilih (sudah menikah) sebesar 6.697 atau sebesar 0,003%. Kemudian, pemilih berumur 17 hingga 30 tahun sebanyak 63.953.031 atau 31,23%.

Sementara pemilih berumur 31 hingga 40 tahun se-

banyak 42.398.719 atau 20,7%. Terakhir, untuk pemilih berumur 40 tahun ke sebesar 98.448.775 atau 48,07%.

Jika diakumulasi, pemilih muda atau yang berumur 40 tahun ke bawah menjadi mayoritas pada Pemilu 2024 dengan jumlah 106.358.447 atau 51,93%.

KPU resmi menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222. Jumlah DPT itu didapat dari hasil rekapitulasi pemilih di 38 provinsi dan para pemilih yang ada di 128 negara.

"Total rekap nasional pemilih dalam dan luar negeri pada 514 kabupaten kota dan 128 negara perwakilan, jumlah kecamatan 7.277; jumlah desa/kelurahan 83.731; jumlah TPS, TPSLN, KSK, pos 823.220; laki-laki 102.218.503; perempuan 102.588.719. Dengan total laki dan perempuan 204.807.222," ujar Betty di Kantor KPU, Jakarta Pusat.

Untuk pemilih di 38 provinsi, kata Betty, terdapat 203.056.748 DPT yang ditetapkan. Angka itu, terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 101.467.243 dan pemilih perempuan sebanyak 101.589.505 pemilih.

Jumlah itu, juga didapat dari 514 kabupaten/kota; 7.277 kecamatan; 83.731 desa

atau kelurahan; 820.161 TPS/TPSLN/KSK/Pos.

Sementara untuk DPT di luar negeri, berjumlah 1.760.474 pemilih. Angka itu terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 751.260 dan pemilih perempuan sebanyak 999.214. Jumlah itu, di dapat dari para pemilih yang tersebar di 128 negara perwakilan. ● mei

Mutasi Rekening Si Kembar Capai Rp86 M, Jumlah Korban Penipuan Lebih Banyak Lagi

JAKARTA (IM) - Ketua Indonesian Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso memprediksi, jumlah korban kasus penipuan preorder iPhone oleh si kembar, Rihana dan Rihani, akan semakin banyak.

Hal itu merujuk laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebut, mutasi rekening "si kembar" sudah mencapai angka Rp 86 Miliar.

"Adanya laporan polisi terhadap reseller yang juga menjadi korban dari Rihana-Rihani tidak menutup kemungkinan akan semakin banyak," ujar Sugeng dalam keterangannya, Minggu (2/7).

"Sementara otak pelakunya belum dapat dibekuk oleh pihak kepolisian," katanya.

Sugeng berharap agar aparat kepolisian segera menangkap Rihana dan Rihani.

Dengan begitu, aparat dapat mengungkap aliran dana yang sejauh ini, diduga telah merugikan reseller hingga Rp 35 miliar.

Selain itu, bantuan dari Detasemen Khusus 88 (Den-88) juga sangat diperlukan dalam kasus ini. Hal itu mengingat sejauh ini keduanya selalu menginkar dari panggilan penyidik.

"Permintaan bantuan kepada Densus 88 oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto sangat diperlukan," ucap Sugeng.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Tran-

saksi Keuangan (PPATK) menyebut mutasi rekening si kembar penipu, Rihana dan Rihani, mencapai Rp 86 miliar. Rihana dan Rihani diduga menipu banyak orang dengan modus preorder atau pemesanan iPhone dengan total kerugian reseller hingga Rp 35 miliar.

"Itu (nilai) mutasi capai Rp 86 miliar" dugaan nilai pembelian produk iPhone saja," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Sabtu (1/7).

Sugeng meminta Polda Metro Jaya untuk menjerat Rihana dan Rihani dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Sebab uang hasil penipuan yang dilakukan oleh si kembar mencapai Rp 35 miliar. Bahkan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut ada mutasi rekening milik Rihana-Rihani yang mencapai Rp 86 miliar.

"IPW juga mendorong Polda Metro Jaya menerapkan TPPU pada Rihana-Rihani," ujar Sugeng.

Sugeng juga meminta kepada pihak Polda Metro Jaya agar menerapkan ini kepada pihak lain yang menerima uang hasil penipuan Rihana-Rihani.

"Serta pihak pihak lain yang menerima dana hasil penipuan secara melawan hukum," jelas Sugeng.

"Juga memproses hukum pihak yang melindungi Rihana-Rihani dalam peralatannya," ujar Sugeng. ● han

Tingkat Kepercayaan ke Polri Naik Menjadi 76,4 Persen

JAKARTA (IM) - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis survei tentang tingkat kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum. Hasilnya,

Survei Indikator Politik Indonesia mengungkap tingkat kepercayaan publik kepada Polri meningkat menjadi 76,4%. Survei tentang tingkat kepercayaan publik terhadap penegak hukum digelar pada 20-24 Juni 2023.

Survei dengan responden 1.220 orang dilakukan dengan cara wawancara tatap muka oleh pewawancara yang terlatih. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling. Adapun margin of error survei +/- 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%.

Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.

Peneliti utama Indikator

Burhanuddin Muhtadi mengungkap tren kepercayaan terhadap Polri meningkat. Artinya, kurang dari setahun Polri berhasil memulihkan citranya.

"Kepolisian juga mulai pulih, jadi yang percaya terhadap polisi di bulan Juni 2023 itu sudah mencapai 76,4% yang mengatakan sangat percaya 10,8% kita gabung dengan mengatakan cukup percaya," kata Burhanuddin saat konferensi pers virtual, Minggu (2/7).

"Kami sampaikan waktu Agustus 2022 saat kami rilis trust Polri anjlok ke angka 54% saat itu kurang lebih sebulan setelah Sambo membetot perhatian publik itu kita sampaikan itulah trust paling rendah polisi kita umumkan saat itu, tapi ternyata kurang dari setahun ya polisi berhasil memulihkan citranya bahkan sedikit menyalip KPK trust Polri itu," imbuhnya.

Berikut tren kepercayaan terhadap Polri dalam penegakan hukum: Agustus 2022 49,8%, September 2022 62,6%, November 2022 58,2%, Desember 2022 62,9%, Februari 2023 68,4%, April 2023 70,8%, dan Juni 2023 74,8%.

Tren kepercayaan terhadap Polri dalam pembentangan korupsi: Agustus 2022 63,9%, September 2022 60,1%, November 2022 54,6%, Desember 2022 59,6%, Februari 2023 64,4%, April 2023 66,9%, Juni 2023 69,2%.

Sementara itu, hasil tingkat kepercayaan terhadap Polri mendapat hasil sebagai berikut:

Pertanyaan: Tolong sebutkan tingkat kepercayaan Ibu/Bapak terhadap masing-masing lembaga tersebut? Apakah Ibu/Bapak sangat percaya, cukup percaya, kurang percaya, atau tidak percaya sama sekali?... (%)

Jawaban responden terkait kepercayaan pada Polri: sangat percaya: 10,8%, cukup percaya: 65,6%, kurang percaya: 20,0%, tidak percaya sama sekali: 3,1%, dan tidak tahu/tidak jawab: 5%. Jika digabung sangat percaya dan cukup percaya 76,4%. ● han

IDN/ANTARA



POLWAN HIBUR PENGUNJUNG HBKB

Sejumlah polwan dari Direktorat Samapta Polda Metro Jaya menghibur seorang anak saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (2/7). Kegiatan tersebut dalam rangka menyemarakkan HUT ke-77 Bhayangkara.

PENGUMUMAN

Berdasarkan Akta tanggal 26 Juni 2023 No. 02, yang dibuat dihadapan SUSHI APRILLINA, SH, MKn, Notaris di Jakarta, seluruh pemegang saham "PT.KUO SHEN PROPERTY DEVELOPER" memutuskan dan menyetujui:

- Membubarkan dan melikuidasi perseroan sejak tanggal 26 Juni 2023.
- Menunjuk Ny. KIKI SAPUTRI sebagai Likuidator Perseroan.

Bagi para pihak yang berkepentingan memiliki tagihan terhadap perseroan, dapat menghubungi Sekretaris Satgas yang beralamat di Kantor PT Bursa Berjangka Jakarta atau Jakarta Futures Exchange, The City Tower Building 20th floor, Jl. M.H. Thamrin No.81, Jakarta Pusat 10310, telp. (021) 31996030, fax. (021) 31996050, pada setiap hari kerja, pukul 09.00 - 16.00 WIB, dengan membawa atau mengirim: (i) Asli perjanjian Nasabah; (ii) Asli bukti Setor; (iii) Asli laporan transaksi Nasabah terakhir; (iv) Asli identitas diri; dan (v) Dokumen pendukung lainnya, serta menyerahkan fotocopy dokumen-dokumen tersebut kepada Tim Satgas sejak hari Senin 03 Juli 2023 s/d hari Senin 17 Juli 2023.

Demikian pengumuman ini disampaikan oleh likuidator perseroan untuk memenuhi ketentuan Pasal 147 dan 149 UU tentang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.

Jakarta, 3 Juli 2023
LIKUIDATOR
KIKI SAPUTRI



PENGUMUMAN



Menindaklanjuti Permohonan PT CCAM Berjangka Indonesia kepada Bappebti dengan Nomor Surat : B.003/CCAM-2pr/03/2023 tanggal 10 Maret 2023 perihal Penutupan Kantor Pialang Berjangka PT CCAM Berjangka Indonesia, maka dalam upaya penyelesaian klaim Nasabah PT CCAM Berjangka Indonesia, Satuan Tugas Penanganan Penyelesaian Pengaduan Nasabah ("Satgas") akan melakukan pemetaan dan verifikasi atas klaim Nasabah PT CCAM Berjangka Indonesia.

Kepada Nasabah yang memiliki sisa dana (equity) di PT CCAM Berjangka Indonesia (hanya untuk Nasabah yang tercatat di PT CCAM Berjangka Indonesia), harap menghubungi Sekretariat Satgas yang beralamat di Kantor PT Bursa Berjangka Jakarta atau Jakarta Futures Exchange, The City Tower Building 20th floor, Jl. M.H. Thamrin No.81, Jakarta Pusat 10310, telp. (021) 31996030, fax. (021) 31996050, pada setiap hari kerja, pukul 09.00 - 16.00 WIB, dengan membawa atau mengirim: (i) Asli perjanjian Nasabah; (ii) Asli bukti Setor; (iii) Asli laporan transaksi Nasabah terakhir; (iv) Asli identitas diri; dan (v) Dokumen pendukung lainnya, serta menyerahkan fotocopy dokumen-dokumen tersebut kepada Tim Satgas sejak hari Senin 03 Juli 2023 s/d hari Senin 17 Juli 2023.

Laporan dari Nasabah PT CCAM Berjangka Indonesia yang disampaikan setelah hari Senin 17 Juli 2023 pukul 16.00 WIB tidak akan dilayani oleh Satgas.

Demikian pengumuman ini disampaikan.

Jakarta, 02 Juli 2023
PT CCAM BERJANGKA INDONESIA